



PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA  
**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**

Jalan Gandanegara Nomor 29 Purwakarta (41111) Telp. (0264) 200036  
P U R W A K A R T A

**KEPUTUSAN KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**

**KABUPATEN PURWAKARTA**

**NOMOR : KPG.03.01.01/09-SK.Sekret.SatpolPP/2023**

**TENTANG**

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA INDIVIDU TAHUN 2022**

**DILINGKUNGAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**

**KABUPATEN PURWAKARTA**

- Menimbang : a. bahwa untuk dapat mengukur Kinerja Pejabat pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purwakarta diperlukan alat bantu ukur berupa Indikator Kinerja Individu;
- b. dimaksud pada huruf a diatas perlu ditetapkan Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purwakarta Tentang Indikator Kinerja Individu Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purwakarta.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1968 Tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja;
9. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri 26 tahun 2005 tentang Pedoman Prosedur Tetap Operasional Satuan Polisi Pamong Praja;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pelaporan Satuan Polisi Pamong Praja;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Dan Pelatihan Dasar Polisi Pamong Praja;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018 Tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1538);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);

17. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
18. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 Tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 8 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 7);
20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 237);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 4 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Pelaksanaan Musrenbang Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2006 Nomor 4);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 16 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2008 Nomor 16);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purwakarta Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2012 Nomor 11);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 9);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2019 Nomor 1);
26. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 228 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Purwakarta;

27. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 78.A Tahun 2019 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2019.
28. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 104 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purwakarta;

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Indikator Kinerja Individu Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purwakarta sebagaimana tercantum dalam Lampiran I;
- KEDUA** : Indikator Kinerja Individu sebagaimana Diktum kesatu bertujuan untuk :
- memberikan Informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan Manajemen Kinerja Organisasi;
  - mengukur pencapaian suatu tujuan dan sasaran sebagaimana yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
- KETIGA** : Indikator Kinerja Individu dimanfaatkan sebagai :
- perencanaan Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purwakarta;
  - perencanaan Tahunan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purwakarta;
  - penyusunan dokumen perjanjian kinerja;
  - penyusunan laporan kinerja instansi Pemerintah;
  - pelaksanaan evaluasi kinerja.
- KEEMPAT** : a. Keputusan ini berlaku sejak Tanggal ditetapkan.
- b. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Penetapan ini, maka akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Purwakarta  
Pada Tanggal 06 Januari 2023

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
KABUPATEN PURWAKARTA



**Tembusan:** disampaikan kepada;

- Yth. Bupati Purwakarta (sebagai laporan);
- Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Purwakarta;
- Yth. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta.

LAMPIRAN I : Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja  
Kabupaten Purwakarta  
Nomor : KPG.03.01.01/09-SK.Sekret.SatpolPP/2023  
Tanggal : 06 JANUARI 2023

**INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (IKI)  
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN PURWAKARTA**

- Jabatan : SEKRETARIS  
 Tugas : Membantu Kepala Satuan dalam memimpin dan mengkoordinasikan penyelenggaraan urusan kesekretariatan yang meliputi perencanaan dan pelaporan, keuangan, serta kepegawaian dan administrasi umum.  
 Fungsi : a. Pengkoordinasian penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan Satuan Polisi Pamong Praja;  
 b. Pelaksanaan manajemen dan administrasi keuangan Satuan Polisi Pamong Praja;  
 c. Pelaksanaan manajemen dan administrasi kepegawaian;  
 d. Pelaksanaan administrasi dokumen dinas dan kearsipan;  
 e. Pengelolaan sarana dan prasarana kerja Satuan Polisi Pamong Praja; dan  
 f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Satuan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/FORMULASI PENGHITUNGAN	SUMBER DATA
Tercapainya pegawai yang memiliki kesesuaian kompetensi	Persentase pegawai yang memiliki kesesuaian kompetensi	Jumlah pegawai yang memiliki kesesuaian kompetensi dibagi Jumlah pegawai x 100 %	Hasil Verifikasi Permohonan/Kebutuhan
Tercapainya Ketersediaan sarana dan prasarana	Tingkat pemenuhan kebutuhan rumah tangga dan sarana / prasarana kantor	Jumlah rumah tangga dan sarana / prasarana kantor yang tersedia dibagi Jumlah rumah tangga dan sarana/prasarana yang dibutuhkan x 100%	Daftar Inventaris Standar kebutuhan Sarana dan Prasaran
Tercapainya Pendataan dan pemeliharaan sarana dan prasarana	Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	Jumlah sarana dan prasarana dalam kondisi baik dibagi Jumlah sarana dan prasarana x100%	Daftar Hasil Rekapitulasi Barang.
Tercapainya Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Persentase Unit Kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi Perkantoran	Jumlah Unit Kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi Perkantoran dibagi Jumlah unit kerja x 100%	Agenda Surat, Dokumen Kepegawaian, Dokumen Program dan Dokumen Keuangan.
Tercapainya Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang tepat waktu.	Persentase Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen rencana dan laporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan dibagi Jumlah dokumen rencana dan laporan Capaian Kinerja dan Keuangan x 100%	1. Peraturan Perundang-undangan yang terkait. 2. Laporan hasil monitoring dan evaluasi
Tersedianya data Kinerja OPD yang dibutuhkan.	Persentase ketersediaan data Kinerja OPD	Jumlah data Kinerja OPD yang disediakan Dibagi Jumlah data kinerja (indikator kinerja tujuan, sasaran program dan kegiatan) OPD yang seharusnya disediakan X 100%	1. Peraturan Perundang-undangan yang terkait. 2. Laporan hasil monitoring dan evaluasi

**INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (IKI)**  
**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN PURWAKARTA**

- Jabatan : Kepala Sub. Bagian Perencanaan dan Pelaporan  
 Tugas : Melaksanakan perencanaan dan pelaporan Satuan Polisi Pamong Praja.  
 Fungsi : a. penyusunan perencanaan program dan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja;  
 b. pelaksanaan koordinasi kegiatan perencanaan, evaluasi dan pelaporan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja;  
 c. pelaksanaan pemantauan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja; dan  
 d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/FORMULASI PENGHITUNGAN	SUMBER DATA
Tersusunnya dokumen laporan kinerja	Jumlah dokumen laporan kinerja	Dokumen laporan kinerja yang dibuat : 1. Laporan Kinerja Tahunan 2. Perjanjian Kinerja 3. Laporan Sakip 4. LKPJ dan LPPD 5. Laporan evaluasi Pembangunan per Triwulan	Data laporan kinerja
Tersusunnya Rencana Kerja dan Anggaran	Jumlah eksemplar perencanaan kegiatan dan anggaran	Jumlah eksemplar dokumen Renja dan RKA yang dibuat	Data dokumen perencanaan
Tersusunnya Review Renstra SKPD	Jumlah eksemplar Dokumen Renstra Satpol. PP	Jumlah eksemplar dokumen Renstra yang dibuat	Data dokumen perencanaan
Tersusunnya Review Standar Pelayanan (SP) dan Standar Operasional Prosedue (SOP)	Jumlah dokumen SP/SOP	Jumlah eksemplar buku Profil yang dibuat	Data penyusunan SP dan SOP

**INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (IKI)**  
**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN PURWAKARTA**

Jabatan : Kepala Sub. Bagian Keuangan  
Tugas : Melaksanakan penatausahaan keuangan Satuan Polisi Pamong Praja.  
Fungsi : a. penatausahaan keuangan Satuan Polisi Pamong Praja;  
b. pelaksanaan koordinasi kegiatan administrasi keuangan Satuan Polisi Pamong Praja;  
c. pelaksanaan penatausahaan keuangan yang meliputi perbendaharaan dan akunting; dan  
d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

<b>KINERJA UTAMA</b>	<b>INDIKATOR KINERJA UTAMA</b>	<b>PENJELASAN/FORMULASI PENGHITUNGAN</b>	<b>SUMBER DATA</b>
Tersusunnya laporan keuangan semesteran	Jumlah eksemplar laporan keuangan semesteran	Jumlah eksemplar berkas administrasi keuangan bulanan (SPP, SPM, UP/GU, SPJ, SSP, laporan penerimaan, pengeluaran, laporan realisasi penyerapan anggaran)	Data register SPP, SPM, UP/GU, SPJ, SSP
Tersusunnya laporan keuangan akhir tahun	Jumlah eksemplar laporan keuangan akhir tahun	Jumlah eksemplar laporan keuangan yang dibuat meliputi Neraca, LRA dan CALK	Data dokumen laporan keuangan

**INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (IKI)**  
**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN PURWAKARTA**

Jabatan : Kepala Sub. Bagian Kepegawaian dan Umum  
 Tugas : menyelenggarakan manajemen kepegawaian, mengelola sarana dan prasarana kerja, mengelola administrasi dokumen dinas dan kearsipan.  
 Fungsi : a. penyelenggaraan manajemen kepegawaian;  
 b. pengelolaan sarana dan prasarana kerja Satuan Polisi Pamong Praja;  
 c. pengelolaan administrasi dokumen dinas dan kearsipan; dan  
 d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/FORMULASI PENGHITUNGAN	SUMBER DATA
Terlaksananya administrasi surat menyurat	Jumlah surat keluar selama 1 tahun	Jumlah surat keluar yang dicatat di buku register	Data Register Surat Data kepegawaian
Terlaksananya layanan telepon, air dan listrik	Jumlah pembayaran jasa telepon, air dan listrik	Jumlah pembayaran jasa air dan listrik	Data pembayaran air dan listrik
Terlaksananya kebersihan kantor	Jumlah jasa pelaksanaan Kebersihan Kantor	Jumlah pelaksanaan pembersihan kantor	Data pelaksanaan kebersihan kantor
Tersedianya alat tulis kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor	Jumlah jenis alat tulis kantor yang disediakan	Data Pengadaan Alat Tulis Kantor
Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah jenis barang cetakan yang disediakan dan Jumlah lembar fotokopi	Data Pengadaan Cetak dan Penggandaan
Tersedianya barang elektronik dan alat listrik	Jumlah barang elektronik dan Alat listrik	Jumlah jenis barang elektronik dan alat listrik yang disediakan	Data Pengadaan barang elektronik dan alat listrik
Tersedianya konsumsi rapat dan tamu	Jumlah konsumsi rapat dan tamu	Jumlah dus makanan yang disediakan	Data pengadaan snack dan nasi kotak
Terlaksananya koordinasi dan konsultasi dengan instansi lain	Jumlah pelaksanaan rapat Koordinasi dan Konsultasi	Jumlah pelaksanaan koordinasi dan konsultasi	Data Register Surat
Tersedianya kendaraan dinas/operasional	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional	Jumlah kendaraan dinas yang dibeli	Data pengadaan kendaraan dinas
Tersedianya peralatan kantor	Jumlah Peralatan kantor	Jumlah jenis peralatan kantor yang dibeli	Data pengadaan peralatan kantor
Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas yang terpelihara	Jumlah unit kendaraan dinas yang diperbaiki	Data pemeliharaan kendaraan dinas
Terpeliharanya perlengkapan kantor	Jumlah Perlengkapan Kantor yang terpelihara	Jumlah unit perlengkapan kantor yang diperbaiki	Data pemeliharaan perlengkapan kantor
Tersedianya pakaian dinas beserta kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas	Jumlah pengadaan pakaian dinas harian dan pakaian dinas lapangan	Data pengadaan pakaian dinas lapangan
Tersedianya pakaian Olah Raga	Jumlah Pakaian Olah Raga	Jumlah pengadaan Pakaian Olah Raga	Data pengadaan Pakaian Olah Raga



**INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (IKI)**  
**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN PURWAKARTA**

Jabatan : Kepala Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah  
Tugas : Menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan dan Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah  
Fungsi : a. penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan teknis penegakan peraturan perundang-undangan Daerah.  
b. Penyelenggaraan pengkajian bahan fasilitasi penegakan peraturan perundang-undangan Daerah; dan  
c. Penyelenggaraan fasilitasi dan pelaksanaan penegakan peraturan perundang-undangan Daerah

KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/FORMULASI PENGHITUNGAN	SUMBER DATA
Terlaksananya pembinaan, pengawasan dan penyuluhan terhadap masyarakat, Aparatur atau Badan Hukum	Frekuensi pembinaan, pengawasan dan penyuluhan terhadap masyarakat, aparaturnya atau badan hukum	Jumlah kegiatan pembinaan, pengawasan dan penyuluhan terhadap masyarakat, aparaturnya atau badan hukum yang dilaksanakan.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Data Perda yang dilakukan pengawasan</li> <li>- Data peserta penyuluhan dan pembinaan</li> </ul>
Tercapainya penindakan atas pelanggaran Perda	Persentase kasus pelanggaran peraturan Perundang-undangan Daerah dan ketertiban umum yang tertangani	Jumlah kasus pelanggaran peraturan perundang-undangan daerah dan ketertiban umum yang tertangani dibagi Jumlah kasus yang harus diangani x 100%	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Data pelanggaran Perda</li> <li>- Data pelanggaran Perda yang ditindak</li> </ul>

**INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (IKI)**  
**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN PURWAKARTA**

Jabatan : Kepala Seksi Pembinaan dan Penyuluhan  
Tugas : Melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis, fasilitasi pembinaan, pengawasan dan penyuluhan dalam Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah.  
Fungsi : a. Pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis dan fasilitasi pembinaan, pengawasan serta penyuluhan dalam penegakan peraturan perundang-undangan Daerah; dan  
b. Pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan penyuluhan dalam Penegakan Perundang-undangan Daerah.

KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/FORMULASI PENGHITUNGAN	SUMBER DATA
Terlaksananya pengawasan pelaksanaan Peraturan Daerah oleh masyarakat	Jumlah Perda yang dilakukan pengawasan	Jumlah Perda yang dilakukan pengawasan	Data Perda yang dilakukan pengawasan
	Jumlah peserta Pembinaan dan penyuluhan Perda	Jumlah peserta Pembinaan dan penyuluhan Perda	Data peserta Pembinaan dan Penyuluhan
Terlaksananya Penertiban Pelanggaran Perda	Jumlah pelanggaran yang ditemukan	Jumlah Pelanggaran Perda yang ditemukan	Data Pelanggaran Perda

**INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (IKI)**  
**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN PURWAKARTA**

Jabatan : Kepala Seksi Penyelidikan dan Penyidikan  
Tugas : Melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis, fasilitasi dan pelaksanaan Penyelidikan dan Penyidikan dalam Penegakan Peraturan Perundang- undangan Daerah.  
Fungsi : a. Pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis dan fasilitasi penyelidikan dan penyidikan dalam Penegakan Peraturan perundang-undangan Daerah; dan  
b. Pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan dalam penegakan perundang-undangan Daerah.

KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/FORMULASI PENGHITUNGAN	SUMBER DATA
Terlaksananya koordinasi dengan instansi terkait dalam penindakan pelanggaran	Jumlah koordinasi penindakan pelanggaran	Jumlah pelaksanaan koordinasi dengan Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan Negeri, PPNS terkait Penindakan Pelanggaran	Data Koordinasi
Tercapainya Penindakan Pelanggaran Perda	Jumlah Penindakan Pelanggaran Pro Justicia	Jumlah penindakan Pelanggaran Perda melalui Penyidikan, BAP dan Persidangan Tipiring	Data Sidang Tipiring

**INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (IKI)**  
**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN PURWAKARTA**

- Jabatan : Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat  
Tugas : Menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta kerjasama.  
Fungsi : a. penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan teknis ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta kerjasama;  
b. penyelenggaraan pengkajian bahan fasilitasi ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta kerjasama; dan  
c. penyelenggaraan fasilitasi dan pelaksanaan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta kerjasama.

KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/FORMULASI PENGHITUNGAN	SUMBER DATA
Tercapainya Pemeliharaan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat di Kabupaten Purwakarta.	Frekuensi pelaksanaan operasi dan pengendalian/ penertiban trantibmas	Jumlah kegiatan operasi dan pengendalian/ penertiban trantibmas yang dilaksanakan	1. Peraturan Perundang-undangan yang terkait. 2. Data Laporan operasi dan pengendalian/ penertiban trantibmas
	Frekuensi pelaksanaan kerjasama, pengawasan, pencegahan dan penertiban terhadap asset daerah	Jumlah kegiatan kerjasama, pengawasan, pencegahan dan penertiban terhadap asset daerah yang dilaksanakan	1. Peraturan Perundang-undangan yang terkait. 2. Data pelaksanaan kerjasama, pengawasan, pencegahan dan penertiban
Terlaksananya Pelayanan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat di Kabupaten Purwakarta.	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkara	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkara dibagi Jumlah warga negara yang diberikan pembinaan X 100%	1. Peraturan Perundang-undangan yang terkait. 2. Data Warga Masyarakat yang memperoleh Pelayanan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat 3. Laporan hasil monitoring, sosialisasi dan evaluasi

**INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (IKI)**  
**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN PURWAKARTA**

Jabatan : Kepala Seksi Operasi dan Pengendalian  
Tugas : Melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis dan fasilitasi operasi serta pengendalian ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.  
Fungsi : a. Pelaksnaan penyusunan bahan kebijakan teknis, fasilitasi operasi dan pengendalian serta pelaksanaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat; dan  
b. Pelaksanaan penyusunan dan pengolahan data kegiatan operasi serta pengendalian ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.

KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/FORMULASI PENGHITUNGAN	SUMBER DATA
Tercapainya ketertiban umum dan lingkungan	Jumlah patroli siaga ketertiban umum dan lingkungan	Jumlah pelaksanaan patroli ketertiban umum dan lingkungan	Data patroli
Terlaksananya pengamanan lokasi kegiatan dan pejabat negara	Jumlah pengamanan lokasi kegiatan dan pejabat Negara	Jumlah pelaksanaan pengamanan lokasi kegiatan dan pejabat negara	Data pengamanan lokasi dan pejabat negara
Terlaksananya penertiban reklame dan bangunan	Jumlah penertiban pembongkaran reklame dan bangunan	Jumlah pelaksanaan penertiban reklame	Data pembongkaran reklame
Terlaksananya Penegakan Trantibum	Jumlah operasi Penegakan Trantibum	Jumlah pelaksanaan operasi Penegakan Trantibum dan pelanggaran Perda	Data Penertiban

**INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (IKI)**  
**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN PURWAKARTA**

Jabatan : Kepala Seksi Kerjasama dan Pencegahan  
Tugas : Melaksanakan penyusunan kebijakan teknis, fasilitasi dan kerjasama serta pencegahan  
Fungsi : a. pelaksanaan penyusunkn bahan kebijakan teknis kerjasama dan pencegahan;  
b. pelaksanaan fasilitasi kerjasama dan pencegahan; dan  
c. pelaksanaan fasilitasi pengamanan dan kerjasama penertiban asset yang belum teradministrasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/FORMULASI PENGHITUNGAN	SUMBER DATA
Terlaksananya koordinasi dengan instansi terkait Pencegahan Ketertiban umum dan Ketentraman Masyarakat	Jumlah koordinasi Pencegahan Ketertiban umum dan Ketentraman Masyarakat	Jumlah pelaksanaan koordinasi dengan TNI, POLRI, Kejaksaan dan Dishub.	Data Koordinasi
Tercapainya ketentraman dan ketertiban umum	Jumlah penertiban trantibum dengan jajaran keamanan lainnya	Jumlah pelaksanaan penertiban trantibum dengan jajaran keamanan lainnya	Data patroli
Teridentifikasinya lokasi-lokasi rawan trantib	Jumlah dokumen lokasi rawan trantibum	Jumlah dokumen peta lokasi rawan trantibum	Data penyusunan peta lokasi rawan trantibum
Tercapainya keamanan gedung dan aset pemerintah Kabupaten Purwakarta	Jumlah lokasi Gedung dan Aset Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta yang diamankan	Jumlah lokasi gedung dan aset Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta yang diamankan petugas Satpol. PP	Data Pengamanan Gedung dan Asset Pemerintah

**INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (IKI)**  
**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN PURWAKARTA**

Jabatan : Kepala Bidang Sumber Daya Aparatur  
Tugas : Menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan dan penyelenggaraan pendayagunaan serta pengembangan sumber daya aparatur Satuan Polisi Pamong Praja dan PPNS  
Fungsi : a. Penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan pendayagunaan dan pengembangan sumber daya aparatur Satuan Polisi Pamong Praja dan PPNS;  
b. Penyelenggaraan pengkajian bahan fasilitasi pendayagunaan dan pengembangan sumber daya aparatur Satuan Polisi Pamong Praja dan PPNS; dan  
d. Penyelenggaraan fasilitasi dan pendayagunaan serta pengembangan sumber daya aparatur dan PPNS.

KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/FORMULASI PENGHITUNGAN	SUMBER DATA
Tercapainya Aparat Satuan Polisi Pamong Praja yang kompeten	Tingkat pemenuhan kebutuhan diklat/bimtek Satpol. PP yang diselenggarakan	Jumlah diklat/bimtek Satpol.PP yang diselenggarakan dibagi Jumlah diklat/bimtek satpol pp yang dibutuhkan x 100%	Data Diklat/Bimtek
Terbinanya Mental dan Fisik Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purwakarta.	Persentase Anggota Satpol. PP yang dibina	Jumlah anggota satpol pp yang dibina dibagi Jumlah seluruh anggota Satpol. PP X 100%	Data Anggota Satpol. PP yang dibina

**INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (IKI)**  
**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN PURWAKARTA**

Jabatan : Kepala Seksi Pendidikan dan Pelatihan  
 Tugas : Melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis dan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan serta peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Polisi Pamong Praja  
 Fungsi : a. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis, fasilitasi dan pelatihan serta peningkatan kapasitas sumber daya aparatur polisi pamong praja; dan  
 b. pelaksanaan penyusunan dan pengolahan data kegiatan pelatihan dan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Polisi Pamong Praja.

KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/FORMULASI PENGHITUNGAN	SUMBER DATA
Terlaksananya Pendidikan dan Latihan Anggota Satpol. PP	Jumlah Anggota Satpol. PP yang mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan.	Jumlah Anggota Satpol. PP yang mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan	Data Anggota yang mengikuti Diklat/Bintek
Terlatihnya Tenaga Pembantu Satuan Polisi Pamong Praja	Jumlah peserta pelatihan	Jumlah Tenaga Pembantu Polisi Pamong Praja yang mendapatkan pelatihan dasar	Data Tenaga Bantu Satpol. PP yang mengikuti pelatihan dasar



**INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (IKI)**  
**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN PURWAKARTA**

Jabatan : Kepala Seksi Pembinaan dan Pengawasan Personil  
 Tugas : Melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis, fasilitasi, pembinaan dan pengawasan personil serta pembinaan teknis fungsional;  
 Fungsi : a. Pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis, fasilitasi, pembinaan dan pengawasan personil serta pembinaan teknis fungsional; dan  
 b. Pelaksanaan penyusunan dan pengolahan data kegiatan Seksi Pembinaan dan Pengawasan Personil.

KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/FORMULASI PENGHITUNGAN	SUMBER DATA
Terlaksananya Pembinaan Fisik dan Mental Anggota Satpol. PP	Jumlah Anggota Satpol. PP yang mendapatkan Pembinaan Fisik dan Mental	Jumlah Anggota Satpol. PP yang mendapatkan Pembinaan Fisik dan Mental	Data Anggota yang dibina
Tercapainya pemahaman Peraturan Perundang-undangan	Jumlah peserta bimbingan teknis	Jumlah Anggota Satpol. PP yang mengikuti bimbingan teknis implementasi Peraturan Perundang-undangan	Data peserta bimbingan teknis Peraturan Perundang-undangan
Tersedianya analisa kebutuhan kompetensi Polisi Pamong Praja	Jumlah dokumen analisa	Jumlah dokumen analisa	Data dokumen analisa

**INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (IKI)**  
**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN PURWAKARTA**

- Jabatan : Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat  
 Tugas : Melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis, fasilitasi, pembinaan dan pengawasan personil serta pembinaan teknis fungsional;  
 Fungsi : a. Penyelenggaraan bahan kebijakan mediasi, komunikasi dan fasilitasi perlindungan masyarakat, meliputi peningkatan sumberdaya manusia Satuan Perlindungan Masyarakat serta kesiagaan dan dukungan penanggulangan bencana; dan  
 b. Penyelenggaraan mediasi, komunikasi dan fasilitasi pengerahan sumberdaya manusia Satuan Perlindungan Masyarakat dalam penanggulangan bencana, ketentraman dan ketertiban masyarakat.

KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/FORMULASI PENGHITUNGAN	SUMBER DATA
Terlaksananya Pembinaan Anggota Satlinmas	Persentase Anggota Satlinmas yang dibina	Jumlah anggota satlinmas yang dibina dibagi Jumlah seluruh anggota Satlinmas X 100%	Data Anggota Satlinmas
Tercapainya keikutsertaan masyarakat dalam linmas	Banyaknya pembinaan potensi masyarakat	Jumlah kegiatan pembinaan potensi masyarakat yang dilaksanakan	Data Potensi Satlinmas

**INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (IKI)**  
**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN PURWAKARTA**

Jabatan : Kepala Seksi Perlindungan Masyarakat  
Tugas : Melaksanakan fasilitasi dan peningkatan kapasitas Satuan Perlindungan Masyarakat  
Fungsi : a. Pelaksanaan penyusunan perencanaan peningkatan kapasitas Satuan Perlindungan Masyarakat;  
b. Pelaksanaan fasilitas dan peningkatan kapasitas Satuan Perlindungan Masyarakat yang terampil dalam rangka penanggulangan bencana dan ketenteraman dan ketertiban masyarakat.

<b>KINERJA UTAMA</b>	<b>INDIKATOR KINERJA UTAMA</b>	<b>PENJELASAN/FORMULASI PENGHITUNGAN</b>	<b>SUMBER DATA</b>
Terlaksananya dukungan Satlinmas dalam kegiatan	Jumlah pengerahan satuan linmas	Jumlah kali satuan linmas yang dikutsertakan dalam kegiatan	Data pengerahan satuan linmas
Terbinanya Satlinmas Kabupaten Purwakarta	Jumlah Satlinmas yang dibina	Jumlah Satuan Linmas yang didata dan dibina se Kabupaten Purwakarta	Data Satlinmas Kabupaten Purwakarta

**INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (IKI)**  
**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN PURWAKARTA**

Jabatan : Kepala Seksi Bina Potensi Masyarakat  
Tugas : Melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis dan fasilitasi pengembangan potensi masyarakat  
Fungsi : a. Pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis bina potensi masyarakat; dan  
b. Pelaksanaan penyusunan dan pengolahan data serta fasilitasi bina potensi masyarakat.

<b>KINERJA UTAMA</b>	<b>INDIKATOR KINERJA UTAMA</b>	<b>PENJELASAN/FORMULASI PENGHITUNGAN</b>	<b>SUMBER DATA</b>
Tersedianya data Pos Ronda se-Kabupaten Purwakarta	Jumlah data Pos Ronda	Jumlah Pos Ronda yang didata di setiap Kelurahan/Desa se-Kabupaten Purwakarta	Data Pos Ronda
Terlatihnya Anggota Linmas dalam kesiapsiagaan dan tanggap darurat	Jumlah peserta pelatihan	Jumlah Anggota Linmas yang mengikuti pelatihan kesiapsiagaan dan tanggap darurat	Data peserta pelatihan
Terbinanya peranan Anggota Linmas	Jumlah peserta Pembinaan	Jumlah Anggota Linmas yang mengikuti Pembinaan	Data peserta Pembinaan